

Peran Komite Audit dalam Meningkatkan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan: Bukti Empiris di Bursa Efek Negara-negara Teluk

This study aims to evaluate the role of Audit Committee in improving the disclosure quality of financial reporting in companies listed on the Gulf Capital Markets (i.e., Saudi Arabia, United Arab Emirate, Qatar, Oman, Kuwait, and Bahrain). Purposive sampling approach selected in sample method, this study ended-up with 17 companies as a sample during 2011-2015 periods. In another word, this study has 85 observations for 5 years. By using multiple linear regressions, the finding shows that Audit Committee which is measured by both Audit Committee Size and Audit Committee number of meeting influences positively on the Disclosure Quality. This finding document that the presence of Audit Committee in companies listed on the Gulf Capital Markets has a significant role in improving the Disclosure Quality of financial reporting. Therefore, with the limited number of sample, this study still contributes to providing empirical evidence on the role of Audit Committee in improving the Disclosure Quality from emerging market, i.e, Gulf Countries.

Keywords: Disclosure Quality, Audit Committee, Audit Committee Size, Audit Committee Meeting

Eko Suyono

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.

Email: ekyo75@yahoo.com

PENDAHULUAN

Dalam kerangka teori agensi seperti yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976), untuk meminimalkan *agency conflict* antara manajer selaku agen dan para pemegang saham selaku *principal*, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah para manajer melakukan pengungkapan (*disclosure*) atas informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan secara memadai. Hal ini karena pengungkapan secara memadai atas informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan akan menjadi media bagi para manajer untuk menyampaikan informasi tentang perusahaan yang mereka kelola kepada seluruh *stakeholders*. Dalam perkembangannya, berbagai referensi dan aturan di berbagai negara mengategorikan pengungkapan menjadi dua aspek, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Aturan pengungkapan wajib memastikan akses yang sama ke informasi dasar yang wajib diungkapkan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku pada bursa efek di masing-masing negara (Lev, 1992). Namun demikian, informasi yang tersaji melalui pengungkapan wajib seringkali dirasa kurang memadai dalam memberikan informasi sebuah perusahaan kepada para *stakeholders*nya sehingga informasi ini harus ditambah dengan informasi yang diberikan melalui pengungkapan sukarela (Cheng dan Courtenay, 2006). Selain hal tersebut, dari sisi perusahaan juga akan mendapatkan banyak manfaat dari informasi yang diungkapkan secara sukarela tersebut, baik berupa insentif pasar maupun berbagai manfaat lainnya, seperti: perusahaan dapat menurunkan biaya modal mereka, mendapatkan kepercayaan investor dan meningkatkan daya jual saham (Kristandl & Bontis, 2007; Apostolos & Konstantinos, 2009).

Menurut Ho dan Wong (2001) krisis keuangan Asia pada akhir 1990 tidak hanya diakibatkan oleh hilangnya kepercayaan investor, tetapi juga karena kurangnya transparansi dalam pengungkapan informasi perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek di Asia. Lebih lanjut, Apostolos dan Konstantinos (2009) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang buruk yang dicirikan dengan tidak adanya transparansi dalam pengungkapan informasi perusahaan di hadapan seluruh *stakeholders*nya adalah salah satu penyebab utama krisis keuangan baik di negara-negara Asia maupun di seluruh dunia. Tata kelola perusahaan yang baik harus memperkuat prosedur pengendalian internal perusahaan dan memastikan pengungkapan yang tepat waktu, akurat, dan komprehensif dari semua informasi penting yang berhubungan dengan sebuah perusahaan, yang mencakup informasi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan saham perusahaan, dan sebagainya.

Selanjutnya, karena pengungkapan wajib dirasa tidak cukup memberikan gambaran memadai atas informasi sebuah perusahaan, maka pengungkapan sukarela perusahaan dianggap sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak internal perusahaan (para manajer) dan investor luar (Akhtaruddin & Haron, 2010; Jiang et al., 2011; Madi et al., 2014), dan bermanfaat untuk menurunkan biaya agensi melalui peningkatan transparansi pelaporan perusahaan (Akhtaruddin & Haron, 2010). Selain itu, diyakini bahwa transparansi dan pengungkapan yang memadai juga penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas (Jiang et al., 2011). Melalui pengungkapan sukarela maka akan lebih menjamin akuntabilitas dan tanggung jawab para manajer dalam pengelolaan perusahaan (Akhtaruddin & Haron, 2010; Li et al., 2012; Madi et al., 2014).

Berbagai penelitian terdahulu sudah banyak yang menguji berbagai faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan, khususnya yang berhubungan dengan pengungkapan sukarela. Salah satu faktor yang berperan dominan dalam mempengaruhi kualitas pengungkapan perusahaan adalah keberadaan Komite Audit di dalam sebuah perusahaan. Komite Audit dianggap sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam menjamin kualitas pengungkapan informasi perusahaan karena Komite Audit mempunyai tugas utama untuk memonitor aktivitas para manajer di sebuah perusahaan (Bedard & Gendron, 2010; Li et al., 2012). Dengan kata lain, keberadaan Komite Audit akan memainkan peran kunci dalam pemantauan praktik pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sekaligus mengoptimalkan fungsi pengendalian internal (Dhaliwal et al., 2010; Persons, 2009). Dengan demikian, diharapkan keberadaan Komite Audit dalam sebuah perusahaan bisa menjalankan peran pengawasannya secara optimal seperti dalam hal pengungkapan informasi perusahaan sehingga akan berkontribusi positif dalam meningkatkan reputasi perusahaan di hadapan seluruh pemangku kepentingan.

Banyak penelitian terdahulu yang berhasil mengkonfirmasi bahwa konsep pengungkapan informasi perusahaan di dalam laporan keuangan berhubungan positif dengan keberadaan Komite Audit dalam perusahaan tersebut, walaupun masih juga terdapat hasil penelitian memperoleh temuan yang tidak sama (Wang & Hussainey, 2013). Sebagai misal, sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa karakteristik Komite Audit mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan praktik pengungkapan di perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Malaysia (Abdullah et al., 2010; Akhtaruddin & Haron, 2010). Lebih lanjut, Akhtaruddin dan Haron (2010) dan Bedard and Gendron (2010) menyatakan bahwa keberadaan Komite Audit yang efektif diperlukan untuk mendukung pengungkapan yang lebih transparan.

Penelitian lainnya yang menghubungkan Komite Audit dan pengungkapan perusahaan adalah Reeb dan Zhao (2013) yang melakukan penelitian pada 615 perusahaan sektor industri di Amerika Serikat dan menemukan bahwa modal manusia (*human capital*) yang berupa pendidikan dan pengalaman dari individu-individu anggota Komite Audit memiliki hubungan positif dengan praktik pengungkapan sukarela. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Felo dan Solieri (2009) tentang pengaruh keahlian dan kemandirian pada pengungkapan perusahaan di Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa peningkatan keahlian dan jumlah anggota independen dari Komite Audit memiliki hubungan positif dengan pengungkapan perusahaan. Demikian juga, studi oleh McDaniel et al. (2002) yang meneliti perbedaan dalam individu dengan keahlian akuntansi/keuangan dalam mengevaluasi pelaporan keuangan, membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara evaluasi pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh individu yang memiliki keahlian di bidang akuntansi/keuangan dengan mereka yang tidak memiliki keahlian di bidang akuntansi/keuangan. Berdasarkan penelitian ini tampak bahwa apresiasi latar belakang, keahlian, dan kualifikasi masing-masing anggota Komite Audit diperlukan untuk mendorong peningkatan cakupan pengungkapan dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan pemegang saham yang dapat memunculkan konflik di antara mereka.

Lebih lanjut Forker (1992) menemukan bahwa keberadaan Komite Audit di perusahaan dapat meningkatkan pengendalian internal sehingga kualitas pengungkapan akan meningkat. Dengan hasil yang sama, Ho dan Wong (2001) menemukan bahwa keberadaan Komite Audit berhubungan positif dengan luas pengungkapan sukarela. Demikian pula, Al-Janadi et al. (2013) meneliti dampak mekanisme tata kelola perusahaan pada pengungkapan sukarela di Arab Saudi dan menemukan bahwa keberadaan komite memiliki kontribusi yang signifikan dalam memberikan pengungkapan sukarela yang berkualitas.

Walaupun umumnya temuan penelitian terdahulu mendukung hubungan positif antara Komite Audit dan pengungkapan sukarela (Barako et al. 2006; Ho & Wong, 2001; Akhtaruddin & Haron, 2010; dan sebagainya). Namun, beberapa penelitian tidak menemukan hubungan semacam itu (misalnya Nasir & Abdullah, 2004; Mangena & Tauringana, 2007, dan Ramadhan, 2014). Dengan demikian, penelitian ini bermaksud menguji secara spesifik pengaruh keberadaan Komite Audit yang diukur dengan banyaknya jumlah anggota Komite Audit dan jumlah rapat Komite Audit yang dilakukan setiap tahunnya terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dengan mengambil sampel penelitian pada perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang yang diwakili oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di 6 Negara Teluk Persia yang tergabung

dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC) yang meliputi Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Kuwait, dan Bahrain.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kerangka teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), konsep kesenjangan informasi (*asymmetric information*) terjadi karena para manajer selaku agen akan lebih menguasai informasi tentang perusahaan dibandingkan para pemegang saham selaku *principal*. Salah satu mekanisme yang bisa digunakan untuk mengurangi kesenjangan informasi ini adalah dengan mendorong para manajer untuk melakukan pengungkapan informasi perusahaan secara memadai, yaitu melalui pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

Glosten dan Milgrom (1985) telah memodelkan hubungan antara pengungkapan perusahaan dan asimetri informasi. Model tersebut menunjukkan bahwa asimetri informasi menurun ketika tingkat pengungkapan perusahaan meningkat. Welker (1995) memberikan bukti empiris yang konsisten dengan model tersebut dimana temuan penelitiannya menunjukkan bahwa kesenjangan informasi yang diukur dengan selisih *bid-ask spread* yang berkurang dan likuiditas pasar meningkat ketika tingkat pengungkapan meningkat. Lang dan Lundholm (1993) melaporkan bahwa tingkat pengungkapan lebih tinggi untuk perusahaan yang lebih besar dan berkinerja baik. Hasil penelitian tersebut juga konsisten dengan prediksi teoritis Glosten dan Milgrom (1985) yang menyatakan bahwa peningkatan pengungkapan dikaitkan dengan penurunan asimetri informasi. Lebih lanjut, Lang dan Lundholm (1993) memberikan bukti bahwa perusahaan dengan kebijakan pengungkapan yang lebih informatif sangat membantu pekerjaan para analis di pasar modal di mana mereka mampu melakukan analisis dengan nilai prediksi yang lebih akurat ketika menggunakan laporan keuangan dengan pengungkapan berkualitas tinggi. Dengan kata lain temuan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan pengungkapan yang lebih informatif sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan informasi.

Scott (2014) menjelaskan bahwa pengungkapan adalah rilis informasi perusahaan kepada pengguna laporan keuangan untuk memungkinkan mereka membuat prediksi yang akurat dalam proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, Scott (2014) menjelaskan bahwa pengungkapan keuangan sukarela adalah jenis informasi keuangan yang disajikan kepada publik, yang disajikan secara sukarela dalam laporan keuangan, tanpa kewajiban untuk menyampaikannya. Bruslerie dan Gabteni (2011) menyatakan bahwa pengungkapan keuangan sukarela adalah informasi keuangan tambahan yang diungkapkan oleh perusahaan, yang melebihi kewajiban pengungkapan yang diamanatkan. Atau dengan kata lain, informasi ini tidak wajib untuk

diungkapkan, tetapi masih diungkapkan oleh perusahaan. Berdasarkan definisi ini dapat diartikan bahwa pengungkapan keuangan sukarela adalah informasi keuangan yang diterbitkan secara sukarela oleh perusahaan dan jika memperluas pengungkapan informasi keuangan wajib.

Selain itu, Scott (2014) menjelaskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi dalam laporan keuangan bersama dengan semua catatan, aktivitas pelaporan pasca, analisis manajemen pada operasi masa depan, keuangan forecasting, dan semua informasi tambahan terkait. Kegiatan pengungkapan ini akan menguntungkan perusahaan dalam hal menciptakan pasar modal yang efisien (Frankel et al., 1995). Dengan tingkat pengungkapan yang tinggi, semua informasi dalam laporan keuangan akan mudah dipahami. Beberapa cara yang mungkin untuk mengungkapkan informasi perusahaan seperti menjelaskan kebijakan akuntansi, kebijakan kontingensi dan ketidakpastian, metode penilaian persediaan, jumlah stok yang beredar, dan sebagainya (Healy & Palepu, 2001).

Perusahaan memiliki banyak insentif untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dimana pengungkapan yang diperluas dapat meningkatkan fungsi intermediasi saham perusahaan di pasar modal. Studi oleh Healy dan Palepu (2001), Bruslerie dan Gabteni (2011), dan sebagainya menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan sukarela mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor luar, dan di antara berbagai jenis investor. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan likuiditas dalam saham perusahaan dan menjadikan saham perusahaan lebih menarik bagi investor institusional. Lebih lanjut, Healy dan Palepu (2001) menemukan bahwa peningkatan rating pengungkapan disertai dengan peningkatan pengembalian saham perusahaan sampel, kepemilikan institusional, dan likuiditas saham. Dengan kata lain, pengungkapan yang diperluas terbukti mampu memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan dalam banyak hal. Manajer yang ingin meningkatkan nilai perusahaan mereka dapat melakukannya dengan mengkomunikasikan informasi superior pribadi mereka melalui pengungkapan yang semakin diperluas cakupannya.

Hipotesis

Komite Audit dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan

Tjager et al. (2003) menjelaskan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Tugas utama dan tanggung jawab Komite Audit adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, terutama transparansi dan keterbukaan, diterapkan secara konsisten dan memadai oleh eksekutif. Pendapat Tjager et al. (2003) menunjukkan peran sentral Komite Audit dalam pengungkapan informasi perusahaan sehingga

individu yang dipilih sebagai anggota Komite Audit harus memenuhi sejumlah kriteria. Selanjutnya, karena Komite Audit adalah komite pengawasan di bawah dewan direksi utama maka dewan direksi mendelegasikan tanggung jawab proses pelaporan keuangan perusahaan kepada Komite Audit (Bedard & Gendron, 2010; Li et al., 2012). Dengan demikian, Komite Audit dianggap sebagai perangkat pemantauan yang diharapkan akan mampu mengurangi asimetri informasi (Akhtaruddin & Haron, 2010; Barako et al., 2006), dan mampu mengurangi biaya agensi (Bedard & Gendron, 2010). Akhtaruddin dan Haron (2010) dan Barako et al., (2006) telah menunjukkan bahwa Komite Audit dianggap sebagai sarana pemantauan dan meningkatkan proses pengungkapan perusahaan termasuk pengungkapan sukarela.

Literatur tentang Komite Audit menjelaskan bahwa efektivitas Komite Audit pada dasarnya berfungsi pada karakteristik-karakteristik Komite Audit (Akhtaruddin & Haron, 2010; Bedard & Gendron, 2010; Dhaliwal et al., 2010; Li et al., 2012; Persons, 2009). Oleh karena itu, kombinasi keterampilan dan pengalaman yang tepat sangat penting dalam mendukung kemampuan Komite Audit untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Berdasarkan teori agensi, Fama dan Jensen (1983) berpendapat bahwa pemantauan yang efektif terhadap perilaku manajemen lebih mungkin dipengaruhi oleh kehadiran para direktur independen. Hal ini karena direksi independen pada Komite Audit tidak memiliki hubungan ekonomi atau pribadi dengan manajemen dan karenanya mereka lebih mungkin untuk bekerja secara independen dan obyektif dari pengaruh manajemen (Bedard & Gendron, 2010). Oleh karena itu, direktur independen di dalam Komite Audit memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengendalikannya dan mengurangi peluang manajemen untuk menahan informasi untuk keuntungan mereka sendiri (Allegrini & Greco, 2013). Oleh karena itu, Komite Audit dengan direktur independen akan menjamin kualitas dan transparansi proses pelaporan keuangan, dan pada akhirnya akan mampu mengurangi asimetri informasi (Allegrini & Greco, 2013; Li et al., 2012). Dengan demikian, pemantauan yang efektif oleh direktur independen pada Komite Audit dianggap lebih memotivasi manajemen untuk memberikan informasi yang akurat dan mampu mendorong manajemen melakukan pemrosesan informasi secara cepat (Haniffa dan Cooke, 2002). Akhtaruddin dan Haron (2010) dan Patelli dan Prencipe (2007) telah menemukan bahwa independensi Komite Audit dikaitkan dengan kualitas pengungkapan yang lebih bersifat sukarela.

Allegrini dan Greco (2013) berargumentasi menggunakan teori ketergantungan sumber daya (*resource dependency theory*) menyatakan bahwa jumlah Komite Audit yang lebih besar akan lebih optimal dalam mencurahkan sumber daya dan otoritas

yang lebih besar untuk secara efektif melaksanakan fungsi pengawasan sebagai tanggung jawab mereka. Sehingga dengan lebih banyaknya jumlah anggota yang duduk di dalam Komite Audit maka akan cenderung untuk lebih membawa keragaman pandangan, keahlian, pengalaman dan keterampilan untuk memastikan pemantauan yang efektif (Bedard & Gendron, 2010). Oleh karena itu, jumlah anggota Komite Audit yang lebih banyak kemungkinan akan membantu komite tersebut untuk mengungkap dan menyelesaikan potensi masalah dalam proses pelaporan perusahaan (Li et al., 2012). Ini menunjukkan bahwa, ukuran Komite Audit merupakan faktor integral untuk memaksimalkan fungsi Komite Audit dalam mengawasi praktik pengungkapan perusahaan secara memadai (Persons, 2009).

Selain jumlah anggota Komite Audit, jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit setiap tahunnya juga sebagai indikator efektivitas pekerjaan Komite Audit. Karamanou dan Vafeas (2005) berpendapat bahwa Komite Audit yang lebih sering bertemu lebih mungkin untuk secara efektif mencapai peran pengawasannya. Allegrini dan Greco (2013) berpendapat bahwa frekuensi pertemuan Komite Audit akan memungkinkan anggota untuk menyatakan penilaian tentang pilihan akuntansi perusahaan tentang prinsip, pengungkapan dan perkiraan. Dalam hal ini, pertemuan reguler Komite Audit akan membuat para anggota komite mendapat informasi yang maksimal tentang isu-isu akuntansi dan audit yang relevan (Allegrini & Greco, 2013). Karena alasan ini, Komite Audit yang lebih aktif, yaitu yang ditandai dengan seringnya mereka mengadakan rapat komite setiap tahunnya akan memberikan para anggotanya peluang yang lebih besar untuk mendiskusikan dan mengevaluasi masalah yang mereka hadapi khususnya yang berhubungan dengan praktik pelaporan keuangan perusahaan (Li et al., 2012). Secara empiris, Allegrini dan Greco (2013) dan Li et al., (2012) telah menemukan bahwa setidaknya empat pertemuan setahun untuk anggota Komite Audit secara signifikan terkait dengan tingkat pengungkapan sukarela dan pengungkapan modal intelektual masing-masing perusahaan.

Berdasarkan berbagai argumentasi dan hasil-hasil temuan dalam penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Jumlah Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan.

H₂ : Jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit dalam setiap tahunnya berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan

METODE PENELITIAN

Data

Data yang diambil melalui penarikan sampel dengan menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa saham Negara-negara teluk yang bisa diakses pada www.gulfbase.com untuk periode 2011-2015 sebagai populasinya. Dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*, sampel diambil dengan kriteria bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur tersebut selama lima tahun berturut-turut yaitu 2011-2015 menerbitkan laporan keuangan dalam bahasa Inggris.

Setelah dilakukan konten analisis pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 6 Negara teluk yang meliputi Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Kuwait, dan Bahrain maka diperoleh 17 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini. Ke-17 perusahaan tersebut adalah AHCS, ALBA-Aluminium Bahrain, Alujain Corporation, Al Jazeera Steel, Al Marai Company, Al Meera, International Qatar, Oman Cables Industry (saog), National Petrochemical Company, Qatar National Cement Company, Ras Al Khaimah Ceramics, Savola, Salam International, Saudi Chemical Company, United Development Company (UDC), Tasnee, dan Qatar Fuel Wqod. Selanjutnya diambil data untuk periode 5 tahun (2011-2015) dari ke-17 perusahaan tersebut sehingga akhirnya diperoleh 85 observasi.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variable dependen, yaitu Kualitas Pengungkapan (*disclosure Quality*); dan 1 (satu) variable independen yaitu Komite Audit.

Kualitas Pengungkapan (Disclosure Quality = DQ)

Untuk mengukur skor pengungkapan, hal ini dilakukan dengan menghitung jumlah poin yang diungkapkan oleh masing-masing perusahaan dan selanjutnya jumlah poin yang diungkapkan tersebut di bagi dengan total skor yang harus diungkapkan. Mengacu pada penelitian Chakroun dan Hussainey (2014) yang melampirkan 72 item-item yang harus diungkapkan pada Bursa Efek di Timur Tengah. Ketujuh puluh dua item pengungkapan tersebut terdiri dari : 15 item pengungkapan yang berhubungan dengan latar belakang informasi perusahaan, 5 item pengungkapan yang berhubungan dengan rangkuman hasil-hasil kinerja keuangan masa lalu, 14 item pengungkapan yang berhubungan dengan data statistik beberapa informasi non-keuangan, 8 item pengungkapan yang berhubungan dengan proyeksi keuangan masa depan, 13 item pengungkapan yang berhubungan dengan hasil-hasil diskusi dan analisis manajemen, 4 item pengungkapan yang berhubungan dengan informasi *intangible* perusahaan, 7 item pengungkapan yang berhubungan dengan laporan

sosial dan lingkungan, dan 6 informasi yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan.

Sehingga, dengan mengacu pada Chakroun dan Hussainey (2014), rumus kualitas pengungkapan adalah sebagai berikut:

$$DQ = \frac{\text{Total Item yang diungkap oleh perusahaan}}{72} \times 100\%$$

Keterangan: DQ = Disclosure Quality atau kualitas pengungkapan

Komite Audit (Audit Committee = CA)

Mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu seperti dalam Akhtaruddin dan Haron (2010), Patelli dan Prencipe (2007), dan Setiani et al. (2017), penelitian ini menggunakan dua proksi untuk mengukur Komite Audit, yaitu jumlah anggota Komite Audit dan jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam setiap tahunnya.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Disamping itu, penyajian analisis data didahului dengan statistik diskriptif dan uji asumsi klasik regresi yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Selanjutnya setelah semua asumsi klasik terpenuhi dilakukan analisis regresi dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$DQ = \alpha + \beta_1 AC_SIZE + \beta_2 AC_MEETING + \varepsilon$$

Keterangan:

DQ = kualitas pengungkapan
 AC_SIZE = jumlah anggota komite audit
 AC_MEETING = jumlah rapat komite audit dalam satu tahun
 ε = eror

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Diskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
DQ	85	14.00	39.00	26.2647	5.78887
AC_Size	85	3.00	6.00	3.8971	1.14787
AC_Meeting	85	7.00	12.00	8.3529	1.41173
Valid N (listwise)	85				

Tabel 1 di atas menjelaskan diskriptif statistik untuk variabel-variabel yang terdapat dalam

penelitian ini. Dari 72 item-item pengungkapan yang dianjurkan, maka perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel melakukan pengungkapan secara bervariasi dari mulai 14 item sampai yang terbanyaknya adalah 39 item. Dengan kata lain rata-rata jumlah item yang diungkap oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel adalah 26 item pengungkapan. Sedangkan terkait dengan Komite Audit, maka jumlah komite audit perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel berkisar dari 3 anggota sampai 6 anggota atau rata-rata 4 anggota. Adapun untuk jumlah rapat tiap tahunnya, maka komite audit melakukan rapat dalam kisaran 7 kali sampai 12 kali per tahun, dengan rata-rata 8 kali per tahun.

Tabel 2. Output Regresi Linier
Coefficients^a

Model		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Error		
1	(Constant)	19.710	2.343	11.283	8.411
	AC_Size	.881	.481	.239	2.217
	AC_Meeting	1.701	.579	.338	2.938

a. Dependent Variable: DQ

FStatistic: 8.633 Sig.: 0.005

R Square: 0.114 Adj R Square 0.101

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa model penelitian ini fit dengan F hitung sebesar 8,633 dan nilai signifikansi 0.005. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa kedua proksi Komite Audit yaitu jumlah anggota (AC_SIZE) dan jumlah rapat setiap tahunnya (AC_MEETING) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan dengan nilai signifikansi masing-masing 0,039 dan 0,005. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dan jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit setiap tahunnya akan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk lebih banyak mengungkapkan item-item pengungkapan yang dianjurkan oleh otoritas bursa efek di negara-negara tersebut. Selanjutnya, dari table 2 di atas dapat disusun persamaan regresi untuk penelitian ini sebagai berikut:

$$DQ = 19,710 + 0,881AC_Size + 1,701 AC_Meeting + \varepsilon$$

PEMBAHASAN

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa jumlah Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan. Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan pada perusahaan-

perusahaan tercatat di Bursa Efek Negara-negara Teluk, sehingga **hipotesis pertama didukung**. Dengan demikian temuan dalam penelitian ini berhasil mengkonfirmasi argumen yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin banyak pengalaman dan pendapat-pendapat anggota komite yang bisa *disharing* kepada anggota yang lainnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, khususnya terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan.

Sedangkan hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit dalam setiap tahunnya berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan. Hasil analisis regresi dalam penelitian ini juga mengkonfirmasi hipotesis ini sehingga **hipotesis kedua dalam penelitian ini didukung**. Temuan dalam penelitian ini mendukung argumen bahwa jumlah rapat merupakan indikator efektivitas kerja komite audit. Sehingga dengan semakin sering anggota komite audit bertemu dalam sebuah rapat komite, akan semakin mendorong intensitas mereka berkomunikasi satu dengan lainnya dalam mendiskusikan isu-isu penting dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, khususnya terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Negara-negara Teluk telah mampu mengoptimalkan perannya dalam pengawasan, sehingga hal ini dapat memperbaiki kualitas arus informasi antara pemilik perusahaan dan manajer, khususnya dalam pelaporan keuangan. Keberadaan Komite Audit sebagai instrumen tata kelola perusahaan telah dapat meningkatkan relevansi dan reliabilitas pengungkapan informasi perusahaan. Dengan kata lain, keberadaan Komite Audit mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengungkapan informasi-informasi yang bersifat sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

Temuan dalam penelitian ini mendukung argumen-argumen yang menyatakan bahwa peran kunci dari Komite Audit adalah membantu dewan direksi dalam mengawasi kebijakan pelaporan perusahaan (Pincus et al., 1989). Temuan sejalan dengan Khlif dan Samaha (2014) dan Samaha et al. (2015) yang menyatakan bahwa Komite Audit memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan investor akan informasi yang jelas, relevan, dan lengkap. Lebih lanjut, sebagai mekanisme kontrol atas manajemen puncak keberadaan Komite Audit diharapkan dapat memastikan bahwa ada peningkatan pengungkapan sukarela untuk memungkinkan penilaian yang akurat atas keputusan dan perilaku manajemen puncak dan menyelaraskan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham (Allegrini dan Greco, 2013). Senada dengan argument di atas, Smith Report (2003) juga menegaskan bahwa Komite Audit memainkan peran

penting dalam memonitor kegiatan dewan dengan meningkatkan kualitas informasi yang diungkapkan dan memastikan perlindungan kepentingan pemegang saham melalui rilis informasi harga saham. Oleh karena itu, ketika peran Komite Audit bisa optimal maka akan meningkatkan kebijakan pelaporan perusahaan dengan level pengungkapan informasi yang semakin lengkap.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan Hussain (2009) yang menulis dalam bukunya setelah melakukan penelitian serupa di Bahrain. Hussain (2009) menjelaskan bahwa kode tata kelola perusahaan Bahrain menyatakan bahwa Komite Audit harus bertemu empat kali setahun dan memiliki setidaknya tiga anggota dan mayoritas anggota termasuk ketua adalah direktur non-eksekutif independen. Pertemuan rutin antar anggota komite dalam rapat yang dilakukan secara reguler terbukti mampu meningkatkan efektivitas pekerjaan seluruh anggota Komite Audit. Hal ini sejalan dengan *The Sarbanes Oxley Act of (2002)* yang mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan Komite Audit yang anggotanya adalah semua direktur independen dan setidaknya satu dari mereka dengan keahlian keuangan. Demikian pula dewan direksi semakin mendelegasikan tanggung jawab untuk pelaporan keuangan kepada Komite Audit supaya tujuan utama Komite Audit untuk memastikan kualitas proses pelaporan keuangan dan memantau penerapan aturan dan peraturan yang mengatur kegiatan keuangan dan non-keuangan dapat mudah dicapai. Komite juga bertanggung jawab atas kegiatan departemen audit internal dan memiliki tanggung jawab untuk penunjukkan auditor perusahaan dan menyetujui remunerasi mereka, mengawasi proses audit perusahaan dan kontrol akuntansi internal dan memastikan auditor dapat independen dalam penyusunan laporan tahunan (Hussain, 2009). Oleh karena itu, komposisi dan karakteristik operasional Komite Audit dipandang sebagai karakteristik penting dari efektivitas Komite Audit.

Temuan dalam penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil membuktikan bahwa keberadaan Komite Audit mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan kualitas pengungkapan, dan meningkatkan sistem pengendalian internal sehingga pelaporan keuangan menjadi lebih andal (Akhtaruddin & Haron, 2010; Patelli & Prencipe, 2007; Ho & Wong, 2001; Bedard & Gendron, 2010; Setiani et al., 2017, dan sebagainya). Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Barako et al. (2006) yang menemukan bahwa kehadiran Komite Audit memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan sukarela. Selanjutnya hasil penelitian ini juga sejalan dengan Al-Janadi et al. (2013) di Arab Saudi yang menemukan bahwa keberadaan komite berhubungan positif dengan pengungkapan yang semakin luas dan transparan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud melakukan analisis atas peran Komite Audit dalam meningkatkan kualitas pengungkapan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Saham 6 negara Teluk meliputi Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Dengan menggunakan pendekatan purposive sampling penelitian ini berhasil mendapatkan 17 perusahaan sebagai sampel untuk periode 2011-2015 sehingga diperoleh 85 observasi.

Output analisis regresi dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Komite Audit yang diproksi dengan jumlah anggota Komite Audit dan jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dan jumlah rapat yang dilakukan setiap tahunnya akan semakin meningkatkan kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

Saran

Hasil deskriptif statistik dalam penelitian ini menunjukkan masih relatif kecilnya jumlah item pengungkapan pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Negara-negara Teluk. Hal ini bisa dilihat dari hasil pada tabel statistik deskriptif yang menyatakan bahwa rata-rata perusahaan-perusahaan tersebut baru mengungkapkan 26 item pengungkapan dari total 72 item pengungkapan yang dianjurkan. Dengan demikian penelitian ini menyarankan kepada manajemen perusahaan-perusahaan tersebut untuk lebih memperluas cakupan pengungkapannya.

Adapun terkait dengan kecilnya jumlah sampel yang hanya 17 perusahaan, maka disarankan bagi penelitian-penelitian sesudahnya untuk bisa memperbesar jumlah sampel sehingga generalisasi akan menjadi lebih optimal. Disarankan juga bagi peneliti berikutnya untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan perusahaan dengan mengambil seting pada negara-negara yang lain.

REFERENSI

- Abdullah, S. N., Mohamad-Yusof, N. Z., and Mohamad-Nor, M. N. 2010. Financial Restatements and Corporate Governance Among Malaysian Listed Companies. *Managerial Auditing Journal*, 25(6), 526-552.
- Al-Janadi, Y., Rashidah, R.A., and Normah, H.O. 2013. Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4 (4), 25-35.
- Allegrini, M., and Greco, G. 2013. Corporate Boards, Audit Committees and Voluntary Disclosure: Evidence From Italian Listed Companies. *Journal of Management & Governance*, 17(1), 187-216.
- Akhtaruddin, M., and Haron, H. 2010. Board Ownership, Audit Committees' Effectiveness and Corporate Voluntary Disclosures. *Asian Review of Accounting*, 18 (1): 68-82.
- Apostolos, K.A. and Konstantinos, A.N. 2009. Voluntary Accounting Disclosure and Corporate Governance: Evidence From Greek Listed Firms. *International Journal of Accounting and Finance*, 1 (4), 395-414.
- Barako, D. G., Hancock, P., and Izan, H. 2006. Factors Influencing Voluntary Corporate Disclosure by Kenyan Companies. *Corporate Governance: An International Review*, 14(2), 107-125.
- Bedard, J., and Gendron, Y. 2010. Strengthening The Financial Reporting System: Can Audit Committees Deliver? *International Journal of Auditing*, 14(2), 174-210.
- Bruslerie, H.D., and Gabteni, H. (2011). Voluntary Disclosure, The Introduction IFRS and Long-Term Communication Policy: An Empirical Test on French Firms. *Working Paper of HAL Id: halshs-00636602*. Available on: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00636602>
- Chakroun, R., and Hussainey, K. 2014. Disclosure Quality in Tunisian Annual Reports. *Corporate Ownership & Control*, 11 (4), 58-80.
- Cheng, E., and Courtenay, S.M. 2006. Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure. *The International Journal of Accounting*, 41 (3), 262-289.
- Dhaliwal, D., Naiker, V., and Navissi, F. 2010. The Association Between Accruals Quality and the Characteristics of Accounting Experts and Mix of Expertise on Audit Committees. *Contemporary Accounting Research*, 27(3), 787-827.
- Fama, E., and Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26, 301-325.
- Felo, A., and Soleri, S.A. 2009. Are all audit committee financial expert created equally. *International Journal of Disclosure and Governance*, 6(2), 150-166.
- Forker, J.J. 1992. Corporate Governance and Disclosure Quality. *Accounting and Business Research*, 22(86), 111-124.
- Frankel, R., McNichols, M., and Wilson, P. 1995. To Warn or Not To Warn: Management Disclosures in The Face of An Earnings Surprise. *The Accounting Review*, 70(1), 135-150.
- Glosten, L., and Milgrom, P. 1985. Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders. *Journal of Financial Economics*, 14, 71-100.
- Haniffa, R. M., and Cooke, T. E. 2002. Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. *Abacus*, 38 (3), 317-349.
- Healy, P. M., and Palepu, K. G. 2001. Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and The Capital Markets: A Review of The Empirical Disclosure Literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31 (1-3), 405-440.
- Hussain, S. 2009. *Corporate Governance: Quantity Versus Quality-Middle Eastern Perspective*, published by eBookIt. Com. Available on: <https://www.ebookit.com/tools/pd/Bo/eBookIt/booktitle-Corporate-Governance---Quantity-Versus-Quality---Middle-Eastern-Perspective>
- Ho, S.M., and Wong, K.S. 2001. A Study of The Relationship Between Corporate Governance Structures and The Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 10, 139-156.
- Jensen, M. C. and Meckling, H. W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305-360.
- Jiang, H., Habib, A., and Hu, B. 2011. Ownership Concentration, Voluntary Disclosures and Information Asymmetry in New Zealand. *The British Accounting Review*, 43(1), 39-53.
- Karamanou, I., and Vafeas, N. 2005. The Association Between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earnings Forecasts: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting Research*, 43(3), 453-486.
- Khlif, H., and Samaha, K. 2014. Internal control quality, Egyptian Standards on Auditing and External Audit Delays: Evidence From The Egyptian Stock Exchange. *International Journal of Auditing*, 18 (2), 139-154.
- Kristandl, G. and Bontis, N. (2007). The Impact of Voluntary Disclosure on Cost of Equity Capital Estimates in a Temporal Setting. *Journal of Intellectual Capital*, 8(4), 577-594.

- Lang, M. and Lundholm, R. 1993. Cross-Sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosures. *Journal of Accounting Research*, 31, 246-271
- Lev, B. 1992. Information Disclosure Strategy. *California Management Review*, 34 (4), 9-32.
- Li, J., Mangena, M., and Pike, R. 2012. The Effect of Audit Committee Characteristics on Intellectual Capital Disclosure. *The British Accounting Review*, 44(2), 98-110.
- Madi, H.K., Ishak, Z., and Manaf, N.A.A. 2014. The Impact of Audit Committee Characteristics on Corporate Voluntary Disclosure. *Proceeding of International Conference on Accounting Studies 2014*, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia
- Mangena, M., and Tauringana, V. 2007. Disclosure, Corporate Governance and Foreign Share Ownership on The Zimbabwe Stock Exchange. *Journal of International Financial Management and Accounting*. 18. 2, 53-85.
- McDaniel, L., Martin, R.D., Maines, L.A., and Peecher, M.E. 2002. Evaluating Financial Reporting Quality: The Effects of Financial Expertise Vs Literacy. *The Accounting Review*, 77: 139-167.
- Nasir, N.M., and Abdullah, S.N. 2004. Voluntary Disclosure and Corporate Governance Among Financially Distressed Listed Firms in Malaysia. *Working Paper Monash University Malaysia*. Available on: file:///C:/Users/Faculty/Downloads/Voluntary_Disclosure_and_Corporate_Governance_amo.pdf
- Patelli, L., and Prencipe, A. 2007. The Relationship Between Voluntary Disclosure and Independent Directors in The Presence of a Dominant Shareholder. *European Accounting Review*, 16(1), 5-33.
- Persons, O. S. 2009. Audit Committee Characteristics and Earlier Voluntary Ethics Disclosure Among Fraud and No-Fraud Firms. *International Journal of Disclosure and Governance*, 6(4), 284-297.
- Pincus, K., Rusbarsky, M., and Wong, J. 1989. Voluntary Formation of Corporate Audit Committees among NASDAQ Firms. *Journal of Accounting and Public Policy*, 8(4) 239-265.
- Ramadhan, S. 2014. Board Composition, Audit Committees, Ownership Structure and Voluntary Disclosure: Evidence from Bahrain. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(7), 124-139.
- Reeb, D.M., and Zhao, W. 2013. Director Capital and Corporate Disclosure Quality. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(4), 191-212.
- Samaha, K., Khlif, H., and Hussainey, K. 2015. The impact of board and audit committee characteristics on voluntary disclosure: A meta-analysis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 24, 13-28.
- Sarbanes-Oxley Act of 2002. Available on: <http://news.findlaw.com/cnn/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf>
- Scott, W.R. 2014. *Financial Accounting Theory*, 7th Edition, Pearson Prentice Hall.
- Setiyan, E., Hartoko, S., Suhardjanto, D., and Honggowati, S. 2017. Audit Committee Characteristics and Voluntary Financial Disclosure. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(3), 239-253.
- Smith Report (2003). *Audit Committees: Combined Code Guidance*, London: Financial Reporting Council. Available on: www.frc.org.uk/publications.
- Tjager, I.N., Alijoyo, A., Djemat, H.R., dan Sembodo, B. 2003. *Corporate governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI).
- Wang, M., and Hussainey, K. 2013. Voluntary Forward-Looking Statements Driven By Corporate Governance and Their Value Relevance. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 26-49.
- Welker, M. 1995. Disclosure Policy, Information Asymmetry, and Liquidity in Equity Markets. *Contemporary Accounting Research*, 11(2), 801-827.